

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Kriteria Ukuran Keberhasilan**

Gambaran kinerja Badan PPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor.196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor.143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis indikator kinerja sasaran strategis (IKKS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator *output/ outcome*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga eselon II harus menggunakan *lag indicator*.

### **B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019**

Capaian kinerja Badan PPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK Badan

PPSDMP tahun 2019. Rincian hasil capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019 pada tabel 3.

Tabel 3  
Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2019

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu dipedesaan	1 Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	15	15,64	104,27	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	2 Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	30	30	100	Berhasil
		3 Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	2,4	2,4	100	Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP	4 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)	3,34	3,46	103,59	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian	5 Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan (%)	90	93,44	103,82	Sangat Berhasil
		6 Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan (%)	20	19,51	102,53	Sangat Berhasil
5.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	7 Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)	83	-	-	-
		8 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) (Nilai)	86,5	89,03	102,92	Sangat Berhasil

Sumber data. Pusat dan Sekretariat Badan, tahun 2019

## 1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2019

Realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2019 umumnya telah memenuhi target perjanjian kinerja Kepala Badan PPSDMP tahun 2019. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang mencapai realisasi diatas 100% (kategori sangat berhasil), 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai realisasi 100%, dan 1 indikator kinerja yang belum realisasi yaitu **Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019 dikarenakan sampai dengan bulan Februari 2020 belum ada penilaian oleh Inspektorat Jenderal.**

Pengukuran capaian kinerja Badan PPSDMP 2019 masing-masing Indikator Kinerja Badan PPSDMP tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019.

Sistem Pertanian Terpadu (SPT) merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu dan berkelanjutan. Penerapan sistem pertanian terpadu diperlukan suatu upaya untuk mendorong para petani dan kelembagaan petani melalui praktek bertani yang produktif, kompetitif, dan efisien serta mampu mempertahankan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok/kelembagaan petani.

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya,

kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya.

Cara mencapai target indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 antara lain melalui kegiatan: (1) Sekolah Lapangan (SL) yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Daerah Irigasi melalui *Integrated Partisipatory Developmnet and Management of Irrigation Project* (IPDMIP), melalui Proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Innitiatif* (READSI); (2) Adaptasi Teknologi yang dilaksanakan di BPP, Pelatihan Pejabat Fungsional dan Pelatihan Non Aparatur, Pelatihan Penyuluh melalui Proyek IPDMIP, Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen, dan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan oleh Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan); (3) Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya yang dilaksanakan di Pos Penyuluhan Pertanian Pedesaan (Posluhdes), pelatihan dan pemagangan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), *Agrosociopreneur* dengan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP).

Pencapaian indikator kinerja ini diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional dengan target 15% atau dengan rumus:

$$\left( \frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang telah menerapkan sistem pertanian terpadu}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut bahwa jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu diperoleh dari jumlah poktan yang telah mengikuti kegiatan Sekolah Lapangan (SL), Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita, Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya. Sedangkan jumlah total kelembagaan petani merupakan jumlah

poktan nasional pada tahun 2018 yang terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Perhitungan capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional adalah:

Untuk mencapai target Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 yaitu sebesar 15%, maka jumlah kelompok tani yang menjadi target yaitu =  $15\% \times 588.637 = 88.296$  poktan

Rincian dari target rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 terdiri dari :

#### I. Sekolah Lapang (SL)

Sekolah lapang adalah proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan serta menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatani lebih efisien, berproduktifitas tinggi dan berkelanjutan. Proses pembelajaran dilakukan dilapangan dimana tersedia objek nyata yang dijadikan materi pembelajaran. Kelompok tani yang mengikuti kegiatan Sekolah Lapangan tersebar di 33 provinsi. Pelaksanaan kegiatan SL selain di BPP, dilaksanakan juga pada Proyek IPDMIP, dan Proyek READSI

A. Jumlah poktan yang mengikuti kegiatan SL di BPP = 46.500 Poktan.

Pelaksanaan sekolah lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dimana wilayah kerja tersebut dipilih 5 (lima) wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Dengan demikian dalam setiap wilayah kerja BPP terdapat 5 (lima) WKPP sebagai pelaksana sekolah lapangan. Fasilitator pelaksanaan sekolah lapangan di WKPP adalah penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah kerja tersebut. Durasi pelaksanaan sekolah

lapangan selama 1 (satu) musim tanam yang disesuaikan dengan musim di lokasi tersebut. BPP dapat memilih musim tanam periode April–September atau Oktober–Maret, pilihan ini diterapkan dengan mempertimbangkan jenis komoditi dan musim pada lokasi. Jumlah peserta sekolah lapangan disetiap WKPP sebanyak 15 orang yang berasal dari 6 kelompok tani di dalam WKPP, dengan rincian 1 (satu) kelompok utama (5 orang) berasal dari lokasi pelaksanaan dan 5 (lima) kelompok pendamping (masing-masing diwakili 2 orang). Metode pembelajaran dalam pelaksanaan sekolah lapangan menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil berbuat (*learning by doing*) sehingga peserta memahami cara pengambilan keputusan dalam mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Rincian Kegiatan SL (Pusluh) adalah Kegiatan SL (Pusluh) = 1550 BPP x 5 WKPP/PP x 6 Poktan = 46.500 Poktan

B. Daerah Irigasi melalui *Integrated Partisipatory Developmnet and Management of Irigation Project* (IPDMIP) = 14.589 Poktan

IPDMIP dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi.

IPDMIP meningkatkan nilai pertanian irigasi berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan sumber penghidupan di perdesaan. Proyek ini mengadopsi pendekatan penetapan sasaran yang inklusif didaerah irigasi sehingga menguntungkan semua petani yang aktif. Kegiatan SL proyek IPDMIP, dimana 4.863 kegiatan SL telah membina 3 (tiga) poktan adalah sebagai berikut :

$$\text{IPDMIP} = 4.863 \text{ SL} \times 3 \text{ Poktan} = 14.589 \text{ Poktan}$$

C. *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Innitiatif* (READSI); READSI = 1.001 Poktan

Proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Innitiatif* (READ-SI) merupakan inisiasi peningkatan skala atas proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development* (READ) yang telah dilaksanakan BPPSDMP sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 pada 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pemerintah Indonesia dari *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dan telah dinilai berhasil oleh Bappenas. Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan READ pada tahun 2015-2017 dilakukan kegiatan Replikasi READ di 2 Provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur di 4 (empat) kabupaten. Proyek READ secara signifikan berhasil memberdayakan petani kecil, meningkatkan pendapatan dan produksi serta memperkuat kelembagaan tingkat desa melalui satu paket lengkap program pemberdayaan yang terintegrasi.

Tujuan program READSI adalah pemberdayaan rumah tangga di pedesaan dilokasi proyek baik secara individu maupun secara kelompok dengan keterampilan membangun rasa percaya diri dan memanfaatkan sumberdaya untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan taraf hidupnya dengan secara berkelanjutan.

II. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita

A. Adaptasi Teknologi yang dilaksanakan di BPP = 1.700 Poktan

Pelaksanaan kegiatan adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan penelitian teknologi yang bersumber dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) dan diujicobakan pada Kawasan tertentu oleh Balai Penyuluhan Pertanian. Penelitian dan penyuluhan pertanian merupakan komponen yang berperan penting dalam mewujudkan peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam mendukung swasembada

berkelanjutan menuju kedaulatan pangan. Kelompokkani yang mengikuti kegiatan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita tersebar di 33 provinsi. Kegiatan SL proyek IPDMIP, dimana 4.863 kegiatan SL telah membina 3 (tiga) poktan dengan rincian sebagai berikut:

Adaptasi Teknologi yang dilaksanakan di BPP = 68 Unit x 5 BPP x 5 Poktan = 1.700 Poktan

B. Pelatihan Pejabat Fungsional = 5.432 Poktan

Badan PPSDMP tahun 2019 telah melaksanakan Diklat fungsional bagi aparatur yaitu penyuluh pertanian sebanyak 679 orang berasal dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Diklat diselenggarakan di 7 (tujuh) UPT pelatihan lingkup Badan PPSDMP yaitu di batangkaluku, binuang, ketindan, kupang, lembang, jambi dan lampung. Pasca mengikuti pelatihan tersebut 1 (satu) orang penyuluh diwajibkan membina minimal 8 poktan, sehingga ditahun 2019 poktan binaan yang telah terbentuk adalah mencapai 5.432 poktan. Rincian kegiatan Pelatihan Pejabat Fungsional adalah 679 Jabfung x 8 poktan = 5.432 Poktan

C. Pelatihan Non Aparatur = 1.804 Poktan

Badan PPSDMP telah melaksanakan pelatihan teknis non aparatur bagi petani di tahun 2019, dari 18.026 orang yang dilatih diwajibkan membina 10 kelompokkani sehingga poktan binaan yang telah terbentuk adalah mencapai 1.804 poktan. Rincian Pelatihan Non Aparatur = 18.049 Petani/ 10 Poktan= 1.804 Poktan

D. Pelatihan Penyuluh melalui Proyek IPDMIP = 3.560 poktan

Pada tahun 2019, Badan PPSDMP telah melaksanakan pelatihan penyuluh melalui proyek IPDMIP bagi 445 penyuluh. Penyuluh yang telah dilatih tersebut diwajibkan untuk 1 (satu) orang penyuluh membina minimal 8 (delapan) kelompokkani sehingga telah terbentuk 3.560 poktan. Rincian Pelatihan Penyuluh melalui Proyek IPDMIP = 445 penyuluh x 8 poktan = 3.560 poktan



- E. Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen = 860 Poktan  
Pengabdian pada masyarakat dilaksanakan oleh 215 orang Dosen dari UPT Pendidikan yaitu di Medan, Bogor, Magelang, Yogyakarta, Malang, Gowa, Manokwari, Sembawa dan Banjarbaru. Setiap 1 (orang) dosen wajib membina 2 poktan penerima manfaat masing-masing sebanyak 2 kali. Sehingga ditahun 2019 telah membina 860 poktan. Rincian pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen =  $215 \text{ Dosen} \times 2 \text{ kali} \times 2 \text{ penerima manfaat (kelompok)} = 860 \text{ Poktan}$
- F. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan oleh Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) = 1.210 Poktan  
Mahasiswa UPT Pendidikan berjumlah 1.210 orang yang berada di polbangtan Medan, Bogor, Magelang, Yogyakarta, Malang, Gowa dan Manokwari, wajib melaksanakan praktek kerja lapangan, dimana 1 (satu) orang mahasiswa UPT Pendidikan wajib membina 1 (satu) poktan. Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Tahun 2019 telah membina 1.210 poktan. Rincian Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan oleh Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) =  $1.210 \text{ Mahasiswa} \times 1 \text{ Poktan} = 1.210 \text{ Poktan}$

### III. Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya:

- A. Penyuluh Pertanian Swadaya = 14.000 Poktan  
Penyuluh swadaya adalah mitra bagi penyuluh PNS/THLTBPP yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penyuluhan pertanian. Penumbuhan dan pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi para petani ahli untuk memotivasi petani lainnya dalam menerapkan teknologi terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah : meningkatkan peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam melakukan kegiatan pembelajaran

sebagai mitra kerja penyuluh pertanian PNS dalam pendampingan kelompok tani dan meningkatkan wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian. Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya melalui kegiatan demplot sebagai sarana pembelajaran bagi kelompok tani dalam penerapan sistem pertanian terpadu (SPT). Kelompok tani binaan penyuluh swadaya tersebar di 33 provinsi.

Rincian penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya yang dilaksanakan di Pos Penyuluhan Pertanian Pedesaan (Posluhdes) = 3.500 PPS x 4 Poktan = 14.000 Poktan

B. Pelatihan dan pemagangan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) = 936 Poktan

Pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya (P4S) merupakan salah satu kelembagaan pelatihan/ permagangan petani yang tumbuh dan berkembang dari petani oleh petani dan untuk petani yang secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian di wilayahnya, dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitas P4S sebagai pusat pembelajaran tani melalui kegiatan pelatihan/permagangan yang memenuhi standar/kaidah proses belajar mengajar pemerintahan melaksanakan pembinaan dan bimbingan bagi pengelola P4S yang mencakup aspek kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, penyelenggaraan pelatihan/permagangan, pengembangan usaha agribisnis dan jejaring kerja proses penumbuhan kelembagaan usaha agribisnis dan jejaring kerja proses penumbuhan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya dapat dilakukan melalui kegiatan :

1. Sosialisasi dan penumbuhan kesadaran tentang peran, manfaat dan keuntungan mendirikan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya

2. Studi banding pada P4S yang relative berhasil
3. Pelatihan manajemen dan kepemimpinan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya
4. Fasilitas pendirian kelembagaan pelatihan pertanian swadaya yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan berdasarkan indicator klasifikasi kelas P4S menjadi kelas pertama madya atau utama bahkan aditama.

Jumlah P4S binaan dari UPT pelatihan lingkup Badan yaitu di batangkaluku, binuang, ketindan, kupang, lembang, jambi dan lampung adalah 234 P4S. Setiap 1 (satu) P4S diwajibkan membina minimal 4 poktan. Tahun 2019 P4S telah membina 936 poktan.

Rincian pelatihan dan pemagangan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah sebagai berikut = 234 P4S x 4 Poktan Binaan = 936 Poktan

- C. *Agrosociopreneur* dengan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) = 500 Kelompok

PWMP merupakan salah satu kegiatan Kementan dalam rangka mewujudkan regenerasi petani yang dirancang untuk penyadaran, penumbuhan, pengembangan dan pemandirian minat, ketrampilan, dan jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian. Selanjutnya, mengembangkan peluang bisnis bagi lulusan sehingga mampu menjadi *job-creator* di sektor pertanian (agribisnis), dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan pertanian sebagai center of agripreneur developmen berbasis inovasi agribisnis

Realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 telah melebihi dari target yaitu 15% (88.296 poktan), karena realisasi telah mencapai 15,64% (92.092 poktan). Rincian realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 pada tabel 4.

Tabel 4  
Realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019

URAIAN		JUMLAH
<b>Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (Poktan)</b>		<b>92.092</b>
<b>a.</b>	<b>Jumlah poktan yang mengikuti kegiatan SL</b>	<b>62.090</b>
-	Sekolah Lapangan	46.500
-	IPDMIP	14.589
-	READSI	1.001
<b>b.</b>	<b>Jumlah poktan yang mengikuti kegiatan adaptasi teknologi spesifik lokalita</b>	<b>14.566</b>
-	Pusluh	1.700
-	Pelatihan pejabat fungsional	5.432
-	IPDMIP	3.560
-	Pelatihan teknis non aparatur	1.804
-	Pengabdian kepada masyarakat	860
-	PKL mahasiswa polbangtan	1.210
<b>c.</b>	<b>Jumlah Tumbuh kembang penyuluh swadaya</b>	<b>15.436</b>
-	Posluhdes	14.000
-	P4S	936
-	Agrosociopreneur (PWMP)	500
<b>Jumlah Poktan Nasional (berdasarkan SIMLUHTAN)</b>		<b>588.637</b>
<b>RASIO (%)</b>		<b>15,64</b>

Sumber data. Pusat Lingkup Badan PPSDMP

Persentase capaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2019 :

$$= 15,64/15 \times 100 = 104,27\% \text{ (sangat berhasil).}$$

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2019.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani. Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan

dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya.

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal untuk untuk mengubah pola pikir dan sikap petani serta meningkatkan usaha tani serta kemampuan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian sehingga dapat terbentuk kelembagaan petani yang memiliki kemampuan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya serta berjiwa kewirausahaan dan mandiri guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Salah satu indikator peningkatan kapasitas kelembagaan petani adalah peningkatan skor dan kelas kemampuan poktan.

Kegiatan peningkatan kapasitas poktan diawali dengan melakukan pemetaan atas keberadaan dan keragaan dari masing-masing kelompok tani oleh penyuluh pertanian untuk mengetahui kemampuan dari aspek manajemen teknis maupun manajemen administrasi mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi usaha tani, dan mengembangkan usaha tani itu sendiri. Adapun hasil pemetaan keragaan kelembagaan petani ditindaklanjuti dengan pembagian kelas kemampuan khususnya kelas kemampuan kelompok tani. Untuk mendukung kinerja penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan kepada kelompok tani dan kelembagaan tani lainnya diberikan fasilitas berupa Biaya operasional penyuluh (BOP) yang diharapkan dapat meningkat kapasitas poktan dengan peningkatan skor dan kelas masing-masing poktan. Penilaian kelas kemampuan kelompok tani merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk memberikan motivasi kepada kelompok tani agar lebih berprestasi dalam hal mencapai kelas kemampuan yang lebih tinggi. Selain itu dapat diketahui kelemahan-kelemahan kelompok yang dinilai sehingga

memudahkan untuk melakukan pembinaan.

Penilaian dilakukan setiap tahun pada bulan November. Kegiatan penilaian dilakukan oleh masing-masing penyuluh pertanian wilayah kerja binaannya. Kelas kemampuan kelompok tani dibagi dalam 4 (empat) kelas yaitu :

1. Kelas pemula dengan skor 0-245
2. Kelas lanjut dengan skor 246-455
3. Kelas madya dengan skor 456-700
4. Kelas utama dengan skor 701-1000

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Pencapaian indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2019 diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional atau dengan rumus:

$$\left( \frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

1. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya berasal dari jumlah Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP, masing-masing penyuluh baik Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani (Poktan) sebanyak 5 (lima) poktan di wilayah kerjanya.
2. Total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional yang terdaftar dalam SIMLUHTAN pada posisi 31 Desember 2018 yaitu 588.637 poktan.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, maka capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional adalah :

$$x = \frac{176.591}{588.637} \times 100\% = 30\%$$

Pada tahun 2019 realisasi rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional sebesar 30% dari target 30% maka persentase capaiannya sebesar 100% atau dengan kategori berhasil.

Secara rinci jumlah poktan yang meningkat kapasitasnya terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5  
Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani pada tahun 2019

No	Uraian	Kelas Kelompok				Jumlah
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1.	Peningkatan Kelas	-	12.177	2.536	288	15.001
2.	Peningkatan Skor	33.297	111.449	15.745	1.099	161.590
	<b>TOTAL</b>	<b>33.297</b>	<b>123.626</b>	<b>18.281</b>	<b>1.387</b>	<b>176.591</b>

Sumber: SIMLUHTAN dan SILUHTAN BPPSDMP, 2019

Pada tabel 24, jumlah poktan yang meningkat kapasitasnya sebanyak 176.591 poktan yang berasal dari peningkatan kelas dan peningkatan skor poktan. Untuk peningkatan kelas poktan dari kelas Pemula ke Lanjut sebanyak 12.177 poktan, dari Lanjut ke Madya sebanyak 2.536 poktan, dari Madya ke Utama sebanyak 288 poktan sehingga total peningkatan kelas sebanyak 15.001 poktan. Sedangkan Peningkatan Skor di kelas Pemula sebanyak 33.297 poktan, di kelas Lanjut sebanyak 111.449 poktan, di kelas Madya sebanyak 15.745 poktan dan kelas Utama sebanyak 1.099 poktan, sehingga total Peningkatan Skor sebanyak 161.590 poktan.

Realisasi Pengukuran Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 telah memenuhi target yaitu **176,591 poktan.**

Sehingga realisasi/target = **176,591/176,591x100 = 100%**

Persentase capaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional adalah **=  $30/30 \times 100 = 100\%$  (berhasil).**

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian.

Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha.

Tujuan dari kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) antara lain: 1). Mendorong terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani yang berbadan hukum; 2). Terbentuknya bisnis petani dalam skala ekonomi berbasis kawasan pertanian; 3). Kelembagaan Ekonomi Petani yang telah berbadan hukum memiliki izin usaha yang terdaftar dilembaga resmi; 4). Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen berbasis kawasan pertanian.

Pencapaian pengukuran kinerja kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani



nasional pada tahun 2018 dengan target 2,3% adalah 287 unit.

Pengukuran targetnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Target} &: = \text{Total KEP (ditahun 2017)} \times \text{Target PK} \\ &= 12.468 \times 2,3\% = 287 \text{ KEP} \end{aligned}$$

Pengukuran rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional 2019 dengan target 2,4% adalah dengan rumus :

$$= \text{Total KEP (ditahun 2019)} / \text{Total Poktan Nasional} \times 100$$

Keterangan :

1. Total KEP tahun 2019 = 14.128 unit
2. Total Poktan Nasional = 588.637 poktan

Realisasi meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional dengan indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional adalah 14.128 poktan.

$$= \mathbf{14.128 / 588.637 \times 100 = 2,4\%}$$

Jumlah KEP tahun 2019 adalah 14.128 unit. Rincian jumlah dan bentuk Kelembagaan Ekonomi petani ditahun 2019 adalah : 5.281 Koperasi Tani, 14 Perseroan Terbatas (PT), 28 Commanditaire Venootschap (Badan usaha), 5.342 KUB, 2.132 LKMA, 1.331 Lainnya. (Data Terlampir)

Persentase capaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional dengan target 2,4% yaitu :

$$= \mathbf{2,4 / 2,4 \times 100 = 100\% \text{ (berhasil)}}.$$

- d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik Badan PPSDMP tahun 2019.

Menurut Permentan RI no.19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat unit kerja pelayanan publik lingkup KEMENTAN bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi masyarakat terhadap suatu jenis Pelayanan Publik. Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat UKPP adalah satuan kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat lingkup Kementerian Pertanian.

Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Kepuasan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan public. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Persyaratan yaitu ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu jenis Pelayanan Publik yang meliputi persyaratan administratif dan teknis.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi Pemberi Pelayanan Publik dan Penerima Pelayanan Publik termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.

4. Biaya atau tarif yaitu besaran biaya atau tarif yang dikenakan kepada Penerima Pelayanan dalam mengurus dan/ atau mendapatkan Pelayanan dari UKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Prasarana dan sarana yaitu berupa penunjang utama terselenggaranya pelayanan publik dan alat atau bahan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP dengan target yaitu 3,34 Skala Likert. Pengukuran Nilai IKM adalah jumlah nilai IKM dari semua unit kerja pelayanan publik/jumlah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan public yang didapat dari hasil survei kepuasan masyarakat dari seluruh unit kerja pelayanan publik pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) lingkup BPPSDMP. Realisasi dan pengukuran IKM adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{Nilai IKM dari semua unit kerja pelayanan publik}}{\sum \text{Unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik}}$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BPPSDMP pada semester I dilaksanakan di 19 (sembilan belas) unit pelaksana teknis dengan responden dipilih secara acak dan penginputan menggunakan dua versi yaitu manual dan melalui aplikasi [ikm.pertanian.go.id](http://ikm.pertanian.go.id) yang terdiri dari: peserta pelatihan, peserta magang, mahasiswa, siswa, alumni dan orang tua siswa memperoleh nilai rata-rata 3,41 dengan nilai IKM

85,37 dengan kriteria mutu layanan BAIK. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BPPSDMP pada semester II dilaksanakan di 20 (dua puluh) unit pelaksana teknis dengan responden dipilih secara acak dan penginputan melalui aplikasi [ikm.pertanian.go.id](http://ikm.pertanian.go.id) yang terdiri dari: peserta pelatihan, peserta magang, mahasiswa, siswa, alumni dan orang tua siswa memperoleh nilai rata-rata 3,51 dengan nilai IKM 87,88 dengan kriteria mutu layanan BAIK.

Pengukuran IKM BPPSDMP Tahun 2019 yang didapatkan dari 9.562 responden adalah nilai rata-rata 3,46 Skala Likert, nilai IKM 86,62 dengan kriteria mutu layanan **BAIK**. Rincian rekapitulasi hasil IKM lingkup BPPSDMP tahun 2019 pada tabel 6.

Tabel 6  
Rekapitulasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Badan PPSDMP  
Tahun 2019

No.	UPT	Responden	Nilai Rata-Rata	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1	PPMKP Ciawi	257	3,89	97,35	A (Sangat Baik)
2	Polbangtan Malang	762	3,35	83,78	B (Baik)
3	Polbangtan Bogor	746	3,58	89,5	A (Sangat Baik)
4	Polbangtan Medan	444	3,32	83,08	B (Baik)
5	Polbangtan Manokwari	442	3,16	78,96	B (Baik)
6	Polbangtan Gowa	491	3,39	84,94	B (Baik)
7	Polbangtan YoMa	1.360	3,26	81,51	B (Baik)
8	BBPP Lembang	769	3,83	95,58	A (Sangat Baik)
9	BBPP Batangkaluku	284	3,63	90,61	A (Sangat Baik)
10	BBPP Batu	578	3,52	87,99	B (Baik)
11	BBPP Ketindan	378	3,33	83,23	B (Baik)
12	BBPKH Cinagara	1.154	3,55	88,64	A (Sangat Baik)
13	BBPP Kupang	253	3,35	83,89	B (Baik)
14	BBPP Binnuang	263	3,67	91,68	A (Sangat Baik)
15	BPP Jambi	116	3,51	87,71	B (Baik)
16	BPP Lampung	245	3,46	83,88	B (Baik)
17	SMK-PP Sembawa	133	3,38	84,43	B (Baik)
18	SMK-PP Banjarbaru	458	3,38	83,72	B (Baik)
19	SMK-PP Kupang	285	3,69	92,36	A (Sangat Baik)
20	PEPI	144	3,65	91,37	A (Sangat Baik)
	<b>BPPSDMP</b>	<b>9.562</b>	<b>3,46</b>	<b>86,62</b>	<b>B (Baik)</b>

Sumber data. Sekretariat Badan 2019

UPT yang memperoleh nilai IKM tertinggi periode 2019 yaitu PPMKP Ciawi dengan nilai rata-rata 3,89 dan nilai IKM 97,35 mutu layanan SANGAT BAIK. UPT yang memperoleh nilai IKM terendah periode 2019 yaitu Polbangtan Manokwari dengan nilai rata-rata 3,16 dan nilai IKM 78,98 mutu layanan BAIK. Hasil pengolahan data survei kepuasan masyarakat lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 pada tabel 7.

Tabel 7  
Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat  
Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2019

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata	Nilai IKM
1.	Persyaratan	86,06	3,44
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	84,67	3,39
3.	Waktu Penyelesaian	84,54	3,38
4.	Biaya atau Tarif	88,52	3,54
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	89,25	3,57
6.	Kompetensi Pelaksana	85,06	3,4
7.	Perilaku Pelaksana	88,60	3,54
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	85,04	3,4
9.	Prasarana dan Sarana	87,06	3,48
	<b>Nilai</b>	<b>86,62</b>	<b>3,46</b>

Sumber data. Sekretariat Badan 2019

Unsur Pelayanan yang mendapatkan penilaian terbaik yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Publik dengan nilai rata-rata 3,57, sedangkan unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian terendah adalah pada Waktu Penyelesaian dengan nilai rata-rata 3,38.

Persentase capaian kinerja meningkatnya kualitas layanan public Badan PPSDMP dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP yaitu :

$$= \mathbf{3,46/3,34 \times 100 = 103,59\% \text{ (sangat berhasil)}}.$$

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2019.

Salah satu tugas kementerian pertanian melalui pusat pendidikan pertanian, Badan PPSDMP adalah mencetak calon wirausaha muda pertanian unggulan, sebagai upaya menarik animo generasi muda

terhadap dunia pertanian. Saat ini, pusat pendidikan pertanian, mempunyai program **Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian** yang telah berjalan sejak tahun 2016. Program ini terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Diharapkan dengan adanya proram ini, lulusan dan alumni POLBANGTAN dan faperta perguruan tinggi mitra dapat menjadi wirausaha muda sukses dan berhasil, yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja muda, dan dapat menjadi petani muda berprestasi dengan jiwa agribisnis yang handal, kreatif, inovatif, profesional dan mampu bersaing di dunia internasional. Salah satu pertimbangan dilaksanakannya program ini adalah, sebagian besar lulusan POLBANGTAN/PT.Mitra terkendala oleh sulitnya memperoleh modal usaha untuk usaha agrisnis mereka. Untuk itu, kementerian pertanian memandang penting untuk mendukung upaya menumbuh kembangkan wirausahawan muda pertanian melalui program pemberian bantuan modal kerja usaha bagi lulusan dari POLBANGTAN/PT.Mitra dapat meningkat dan menciptakan wirausahawan muda.

**Retooling** adalah kegiatan pelatihan bagi mahasiswa polbangtan yang dilaksanakan Pusdiktan bekerjasama dengan Best Planter Indonesia (BPI) di bogor dalam rangka mencetak asisten unggul perkebunan sawit setelah selesai akan disalurkan ke perusahaan sawit.

Pengukuran kinerja meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan dengan **target 90%** adalah dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah lulusan pendidikan bekerja dibidang pertanian}}{\text{Jumlah lulusan pendidikan pertanian}} \times 100$$

Keterangan rumus rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan.

Untuk mencapai target 90% dari rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan adalah =  $90\% \times 1.266 = 1.139$  orang.

Jumlah lulusan pendidikan pertanian pada tahun 2019 adalah **1.266 orang**. Lulusan Pendidikan pertanian tahun 2019 terdiri dari 831 orang jumlah lulusan Polbangtan dan 435 orang lulusan SMKPP. Rincian jumlah lulusan pendidikan pertanian pada masing-masing UPT lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 pada tabel 8.

Tabel 8  
Lulusan Pendidikan Pertanian Pada UPT Lingkup Badan PPSDMP 2019

No	Nama UPT	Jumlah Lulusan
<b>Polbangtan</b>		
1.	Polbangtan Bogor	179
2.	Polbangtan Malang	171
3.	Polbangtan Yogya- Magelang	204
4.	Polbangtan Medan	79
5.	Polbangtan Gowa	133
6.	Polbangtan Manokwari	65
	Jumlah 1	831
<b>SMK-PP</b>		
1.	SMK-PP Sembawa	184
2.	SMK-PP Banjarbaru	146
3.	SMK-PP Kupang	105
	Jumlah 2	435
<b>Total 1+2</b>		<b>1.266</b>

Sumber data. Pusat Pendidikan Pertanian, 2019

Lulusan Polbangtan terbanyak adalah dipolbangtan YOMA dan lulusan paling sedikit di polbangtan Gowa. Lulusan SMKPP terbanyak adalah di SMKPP Sembawa dan lulusan paling sedikit di SMKPP Kupang.

Lulusan UPT pendidikan pertanian lingkup Badan PPSDMP yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2019 adalah **1.183 orang**. Sebaran lulusan UPT lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 bekerja dibidang pertanian adalah yang bekerja dibidang pertanian, perkebunan dan wirausaha yaitu 75 orang, kuliah dibidang pertanian yaitu 165 orang, PWMP yaitu 872 orang dan Retooling yaitu 71 orang. Sebaran lulusan

UPT Pendidikan lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 yang bekerja dibidang pertanian pada tabel 9.

Tabel 9  
Sebaran lulusan UPT Pendidikan lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 yang bekerja dibidang pertanian

No	Satker	Lulusan	Sebaran Lulusan Yang Bekerja Di Bidang Pertanian				
			Bekerja	PWMP	Retooling	Kuliah	Jumlah
1	Medan	179	-	74	5	-	79
2	Bogor	171	-	171	8	-	179
3	Yoma	204	-	191	13	-	204
4	Malang	79	-	157	14	-	171
5	Gowa	133	-	109	24	-	133
6	Manokwari	65	-	56	7	-	63
7	Sembawa	184	52	42	-	50	144
8	Banjarbaru	146	20	42	-	53	115
9	Kupang	105	3	30	-	62	95
	<b>TOTAL</b>	<b>1.266</b>	<b>75</b>	<b>872</b>	<b>71</b>	<b>165</b>	<b>1.183</b>

Sumber data. Pusat Pendidikan Pertanian, 2019

Jumlah lulusan yang bekerja di bidang pertanian paling banyak adalah dari UPT polbangtan YOMA dan paling sedikit adalah dari polbangtan Manokwari.

Realisasi lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada 2019 yaitu **1.183 orang** telah melebihi dari target yaitu **1.139 orang**

Pengukuran realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada 2019 yaitu :  $1.183/1.266 \times 100 = 93,44\%$

Persentase capaian kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2019 adalah :

**=  $93,44/90 \times 100 = 103,82\%$  (sangat berhasil).**



f. Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan tahun 2019.

Penurunan rata-rata competency gap index peserta pelatihan dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan atas jabatan atau pekerjaan individu setelah mengikuti diklat atau pelatihan. Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Pengukuran kinerja meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan dengan target 20% adalah dengan rumus :

= Standar Kompetensi Kerja (SKK) – rata-rata nilai kompetensi (70% x nilai pengetahuan dan keterampilan + 30% x nilai sikap dan perilaku).

Penjelasan rumus formula CGI yaitu:

1. Nilai Standar Kompetensi Kerja (SKK) menggunakan bobot 70 – 100% disesuaikan dengan bobot jenis pelatihan
2. Nilai Kompetensi diperoleh dari hasil evaluasi pada saat pelaksanaan pelatihan dengan nilai rata-rata 70% dikali nilai pengetahuan dan keterampilan (nilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan yaitu nilai rata-rata (kemajuan berlatih + penguasaan materi (LP6) ditambah nilai rata-rata 30% dikali nilai aspek sikap dan perilaku (LP7) diperoleh dari penilaian sikap dan perilaku.

Target Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan tahun 2019 adalah 20%. Realisasi meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan tahun 2019 adalah **19,51%**. Rincian Target dan Realisasi Nilai Rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan di UPT Lingkup Badan PPSDMP tahun 2019 pada tabel 10.

Tabel 10  
Target dan Realisasi Nilai Rata-rata *Competency Gap Index* (CGI)  
peserta pelatihan di UPT Lingkup Badan PP5DMP tahun 2019

No	UPT	Nilai <i>Competency Gap Index</i> (CGI)		
		Target	Realisasi	%
1	PPMKP Ciawi	20.00	18.34	109.05
2	BBPP Lembang	20.00	16.53	120.99
3	BBPKH Cinagara	20.00	18.63	107.35
4	BBPP Batu	20.00	19.82	100.91
5	BBPP Ketindan	20.00	20.42	97.94
6	BBPP Batangkaluku	20.00	18.51	108.05
7	BBPP Binuang	20.00	19.56	102.25
8	BBPP Kupang	20.00	20.45	97.80
9	BPP Jambi	20.00	20.81	96.11
10	BPP Lampung	20.00	21.99	90.95
<b>Rata-rata</b>		<b>20.00</b>	<b>19.51</b>	<b>102.53</b>

Sumber data. Puslatan 2019

Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan atas jabatan atau pekerjaan individu setelah mengikuti diklat atau pelatihan. Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Persentase capaian kinerja meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja Penurunan rata-rata *Competency Gap Index* (CGI) peserta pelatihan tahun 2019 adalah =  $20/19,51 \times 100 = 102,53\%$  (**sangat berhasil**).

Dalam rangka pencapaian tujuan perjanjian kinerja (PK) penurunan *Competency Gap Indeks* (CGI) pelatihan diperoleh dari hasil capaian indikator kinerja kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yang meliputi :

1. Pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian.

Pelatihan dimaksud diarahkan kepada peningkatan kemampuan penyuluh, petugas dan penerima manfaat dalam melakukan persiapan, penanaman, pemeliharaan benih/bibit sehingga dapat tumbuh dan berproduksi secara baik di sentra produksi/ pengembangan komoditas strategis serta dikawasan tertinggal,

terluar dan terdepan (3T). Komoditas strategis dimaksud meliputi (1) Tanaman Pangan diutamakan padi, jagung, kedelai melalui program UPSUS PAJALE, (2) Hortikultura diutamakan bawang merah, bawang putih dan aneka cabe, (3) Perkebunan diutamakan kopi, kakao, karet, tebu, kelapa dalam, (4) Peternakan diutamakan dalam bentuk peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting melalui program UPSUS SIWAB (5) Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Pelatihan dialokasikan di 10 (sepuluh) UPT Pelatihan Pertanian Pusat dalam bentuk : (a) pelatihan teknis bagi Aparatur dan Non Aparatur (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, alat dan mesin pertanian (alsintan)); (b) Pelatihan fungsional bidang pertanian dan non pertanian; (c) pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian dalam rangka mendukung reformasi birokrasi.

2. Penguatan Kelembagaan P4S sebagai Pusat Pemberdayaan Petani.

Klasifikasi Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya berkembang dari inisiasi petani di perdesaan yang dikelola oleh petani untuk mengembangkan usaha tani mereka, sangat berpotensi dalam pemberdayaan petani ke depan. Keberadaan kelembagaan P4S sangat strategis untuk terus diberdayakan, antara lain melalui aspek manajemen diklat/magang maupun pengembangan usaha, sehingga kontribusinya dalam mempercepat penerapan teknologi baru di bidang pertanian/ agribisnis di tingkat petani dan masyarakat perdesaan meningkat secara nyata. Sehubungan dengan hal tersebut telah terbit Permentan nomor 33 Tahun 2016, bahwa kelembagaan pelatihan pertanian swadaya terdiri dari P4S dan Lembaga Pelatihan Swadaya lainnya;

3. Sertifikasi Kompetensi Profesi SDM Bidang Pertanian

Sertifikasi kompetensi sektor pertanian adalah proses pemberian sertifikat kompetensi sektor pertanian yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi kerja. Dalam pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi diperlukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang

bertanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi sampai dengan penerbitan sertifikat dan pemeliharaan sertifikatnya. LSP juga bertugas dalam penyediaan sarana prasarana sertifikasi, perangkat sertifikasi SDM yang kompeten dalam pelaksanaan sertifikasi, dan asesor kompetensi. Peserta serifikasi adalah SDM yang mempunyai profesi tertentu. Peserta sertifikasi adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan atau seseorang yang telah mengikuti pelatihan atau seseorang yang telah berpengalaman dalam bidangnya dan mendaftarkan diri untuk mengikuti asesmen dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam skema sertifikasi. Asesor kompetensi adalah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang profesi tertentu dan mendapat penugasan dari LSP untuk melaksanakan penilaian secara profesional pada peserta sertifikasi.

- g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019.

Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019 dikarenakan sampai dengan bulan Februari 2020 belum ada penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

- h. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 di tahun 2019

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan indikator kinerja Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 adalah dengan ditetapkannya target capaian kinerja yaitu 86,50 Nilai. Realisasi pencapaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2019 adalah **nilai 89,03**.

Rincian pencapaian kinerja tahun 2019 adalah :

1. Capaian keluaran program = 100
2. Penyerapan anggaran = 92,54
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan = 94,15
4. Efisiensi = 9,21

5. Capaian sasaran program = 100

6. Rata-rata nilai satker = 81,22

Sumber data adalah berdasarkan PMK 214 tahun 2017 melalui aplikasi SMART.

Persentase capaian kinerja Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 di tahun 2019 adalah :

=  $89,03/86,50 \times 100$

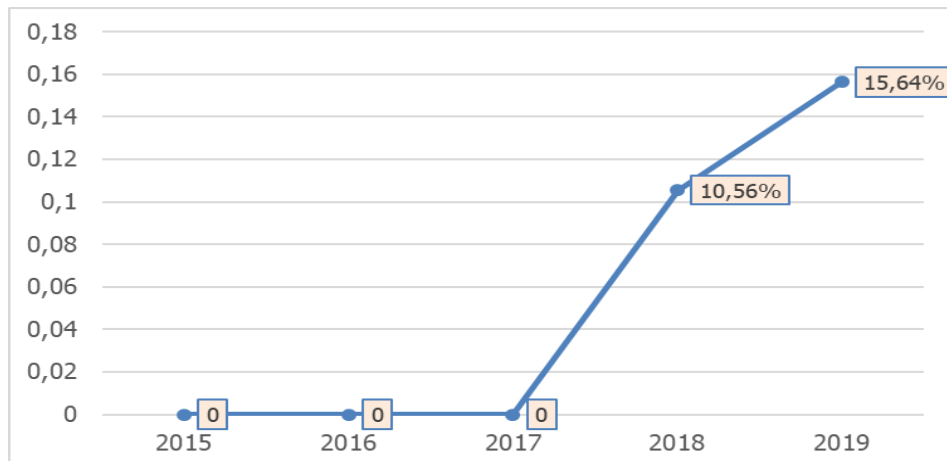
= **102,92% (sangat berhasil)**

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP tahun 2015–2019.

a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 adalah **15,64%** dari target 15%.

Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019 pada gambar 4.



Gambar 4. Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019

Perkembangan realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Indikator kinerja

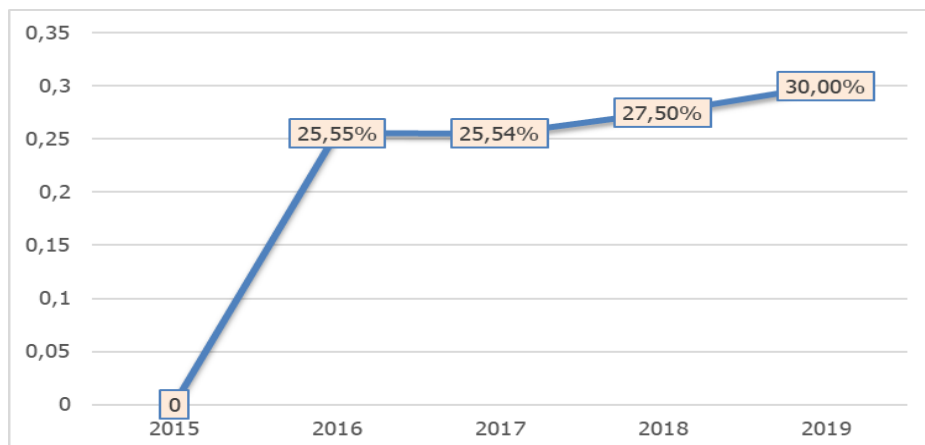
rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018.

Realisasi capaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2018 sebesar 10,56% dan tahun 2019 sebesar 15,64%.

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2019 yaitu **30%** dari target 30% .

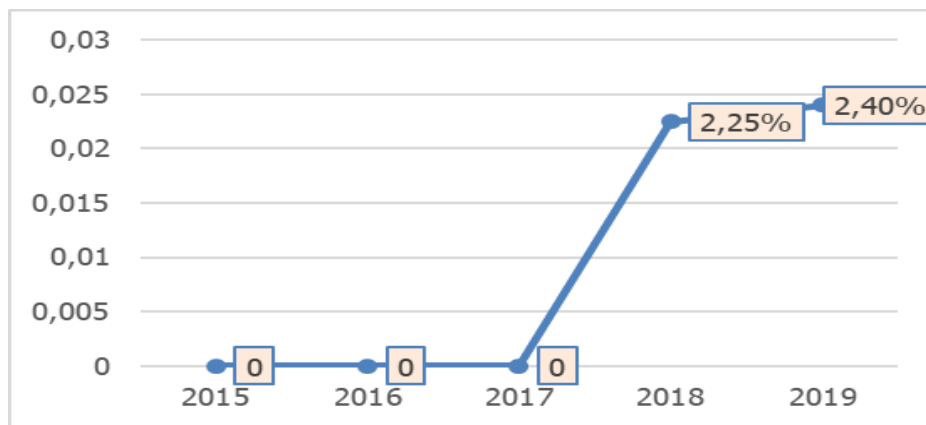
Realisasi rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019 pada gambar 5.



Gambar 5. Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional 2015-2019

Perkembangan realisasi rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional dari tahun 2015–2019 secara umum selalu meningkat. Realisasi capaian kinerja rasio pada tahun 2016 sebesar 25,55%, tahun 2017 sebesar 25,54%, tahun 2018 sebesar 27,50% dan tahun 2019 sebesar 30%.

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2015-2019. Realisasi pencapaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019 adalah **2,4%** dari target 2,4%.
- Realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019 pada gambar 6.



Gambar 6. Realisasi capaian Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2015-2019

Perkembangan realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018.

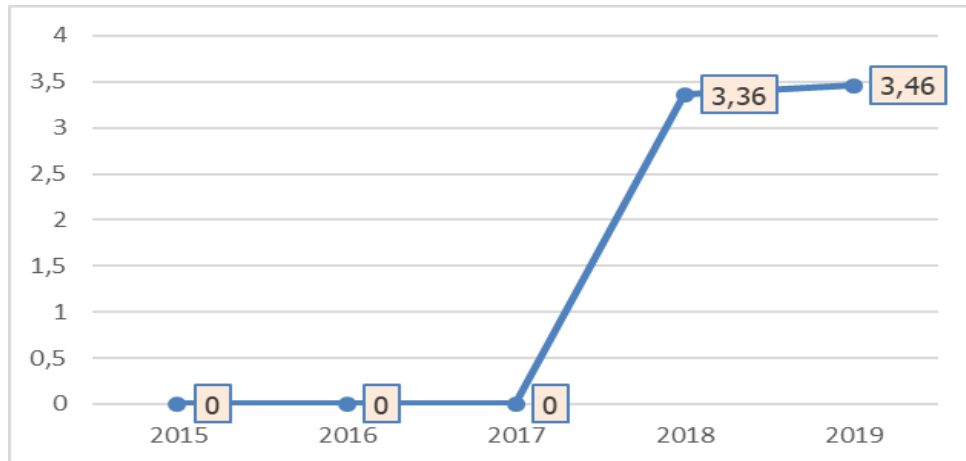
Realisasi capaian kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2018 sebesar 2,25% dan tahun 2019 sebesar 2,4%.

- d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) pada tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik BPPSDMP tahun 2019 adalah **3,46 Skala Likert** dan telah melebihi dari target yaitu 3,34 Skala Likert. Penilaian

tersebut dilakukan oleh para *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan unit kerja layanan masyarakat di 19 Unit Pelayanan teknis lingkup BPPSDMP. Berdasarkan Rencana Strategis BPPSDMP, Indikator Kinerja Sasaran Program IKM atas layanan publik BPPSDMP diterapkan pada tahun 2018.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP tahun 2015-2019 pada gambar 7.



Gambar 7. Realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP tahun 2015-2019

Perkembangan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018.

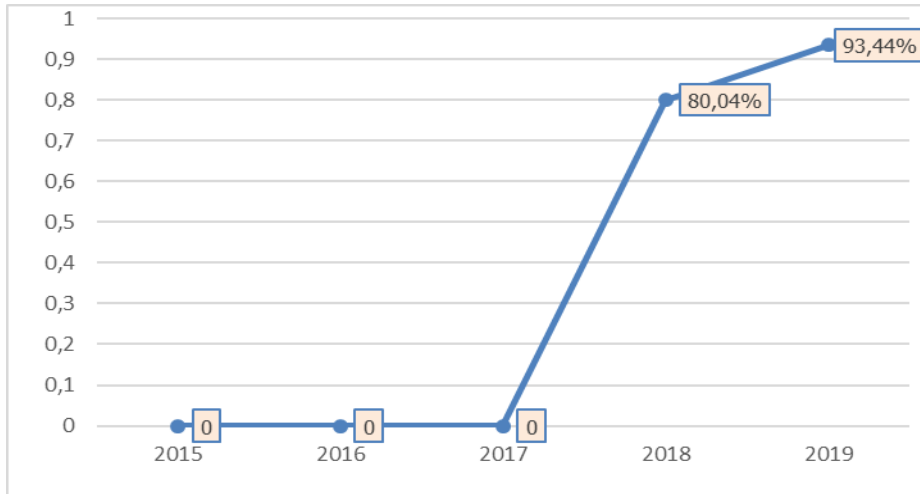
Realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP pada tahun 2018 sebesar 3,36 Skala Likert dan tahun 2019 sebesar 3,46 Skala Likert.

e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan ditahun 2019 adalah **93,44%** dari target 90%.

Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2015-2019 pada gambar 8.





Gambar 8. Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2015-2019

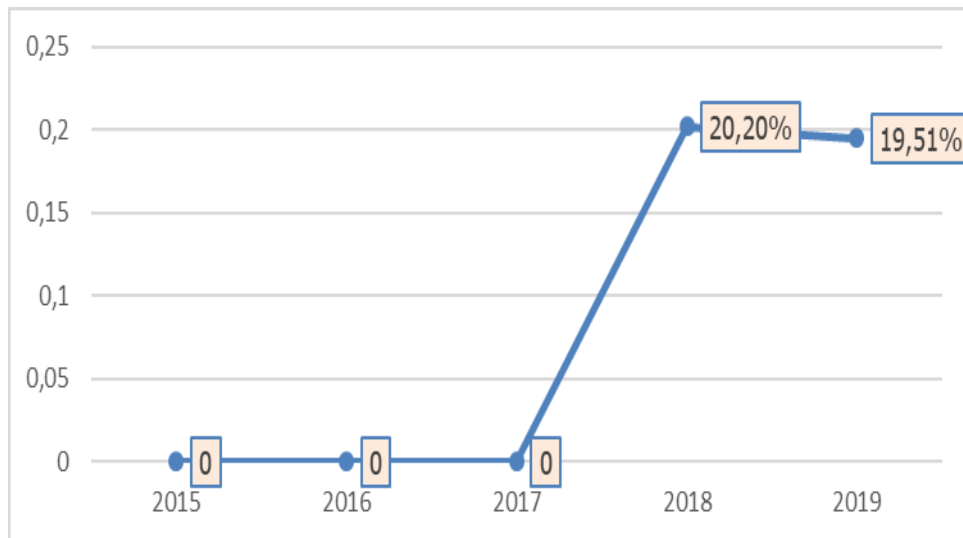
Perkembangan realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Indikator kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018.

Realisasi capaian kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan pada tahun 2018 sebesar 80,04% dan tahun 2019 sebesar 93,44%.

- f. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan sudah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu **19,51%** dari target 20%.

Realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2015-2019 pada gambar 9.



Gambar 9. Realisasi penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2015-2019

Perkembangan realisasi penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019. Indikator kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018.

Realisasi capaian kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan pada tahun 2018 sebesar 20,20% dan tahun 2019 sebesar 19,51%.

- g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

Realisasi pencapaian kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019 masih menunggu penilaian oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Hasil evaluasi Nilai AKIP Badan PPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementan dari tahun 2015 sd 2019 yaitu 71,73 (2015), 77,41 (2016), 83,29 (2017) dan 84,27 (2018) pada tabel 11.

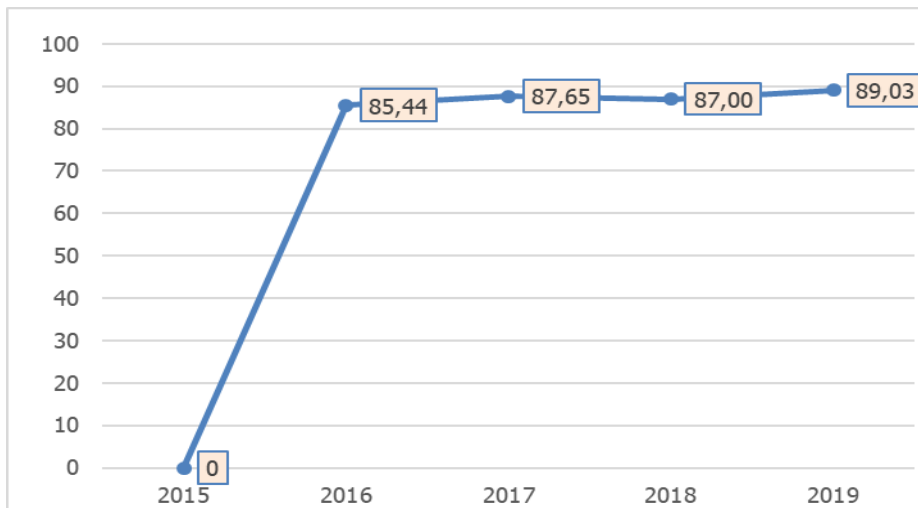
Tabel 11  
Hasil penilaian evaluasi SAKIP Badan PPSDMP oleh Inspektorat Jenderal  
tahun 2015-2018

No	Komponen Yg Dinilai	Bobot	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30	22,14	24,61	27,06	27,06
2	Pengukuran Kinerja	25	18,96	19,27	20,83	21,15
3	Pelaporan Kinerja	15	10,33	10,33	12,28	12,28
4	Evaluasi Kinerja/Evaluasi Internal	10	5,88	7,38	7,29	7,96
5	Capaian Kinerja	20	14,42	15,83	15,83	15,83
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>71,73</b>	<b>77,41</b>	<b>83,29</b>	<b>84,27</b>

Sumber Data. Sekretariat Badan, tahun 2015-2019

- h. Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) tahun 2015-2019, tahun 2019.

Realisasi pencapaian kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) di tahun 2019 adalah nilai **89,03** dari target nilai 86,5. Realisasi Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017, selama tahun 2015-2019 pada gambar 10.



Gambar 10. Realisasi Capaian Kinerja Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2015-2019

Perkembangan realisasi capaian Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Indikator kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) baru menjadi target PK Kepala Badan mulai tahun 2018, tetapi data realisasi nilai

kinerja dari tahun 2015 sd 2017 didapat dari hasil monitoring nilai kinerja unit eselon I yaitu Badan PPSDMP.

Realisasi capaian kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) pada tahun 2016 sebesar 85,44%, tahun 2017 sebesar 87,65%, tahun 2018 sebesar 87,00% dan tahun 2019 sebesar 89,03%.

### **3. Perbandingan capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2015 sd 2019)**

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2019** adalah **15,64%**. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional adalah **15%**. Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2019** adalah **30%**. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional adalah **30%**. Realisasi capaian kinerja telah memenuhi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2019** adalah **2,4%**. Target jangka menengah dalam renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio

kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional adalah **2,4%**. Realisasi capaian kinerja telah memenuhi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert), tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) penilaian para pengguna layanan di UPT lingkup BPPSDMP **tahun 2019** adalah **3,46%**. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP, yaitu nilai **3,34** (Skala Likert). Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan, tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan **tahun 2019** adalah **93,44%**. Target jangka menengah dalam renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun 2019 adalah **90%**. Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- f. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan **tahun 2019** adalah **19,51%**. Target jangka menengah dalam renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan adalah **20%**. Realisasi capaian kinerja telah melebihi target Renstra Badan PPSDMP (2015-2019).

- g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2019.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian **tahun 2019** belum